

KARAKTERISTIK SUMBER FORMIL DAN MATERIL HUKUM ISLAM INDONESIA

Rusdi Sulaiman

IAIN Pontianak

Email: rusdisulaimandaud@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the criteria for formal and material sources of Islamic law in Indonesia as represented in the fatwas of Muhammadiyah, NU and MUI. The method used is content analysis which is descriptive-evaluative. With its descriptive nature, content analysis is expected to describe the formal and material sources of Islamic law in Indonesia as they are, objective and in-depth. With its evaluative nature, this analysis is expected to present a critical interpretation of the criteria for formal and material sources of Islamic law in Indonesia as issued by Muhammadiyah, NU and MUI's fatwa. This study concludes that the criteria for sources of Islamic law, both formal and material, in Muhammadiyah fatwas are the Koran, hadith or *sunnah maqbūlah* (acceptable), and a mind that is in line with textual references or stands alone as long as it does not conflict with the Koran and *maqbūlah sunnah*. These intellect are sometimes collective, meaning that they are carried out together (collective *ijtihad*). These thoughts can be judged from a formal perspective, namely following the agreed procedures or methods of interpretation of Islamic law, or judged materially by following, among others, 'urf qānūni (positive law), experts although not legal experts, and not internal Muhammadiyah scholars. These minds are professional minds (according to the problem) and public minds (according to context). All of this is demonstrated by Muhammadiyah fatwas in the fields of business, worship and marriage. The criteria for the source of Islamic law, both formal and material, in the NU fatwas are the Koran, hadith, and a mind that is in line with the *maqāshid shari'ah* (shari'at objectives). NU, like Muhammadiyah, accepts positive law as a criterion for Islamic law, both formal and material. All of this is demonstrated by the NU fatwas on business, worship and marriage. The criteria for sources of Islamic law, both formal and material, in the MUI fatwas are the Koran, hadiths, and a mind that is in harmony with the public, public and nationality, *sadd al-dzari'ah* ("preventive action"). MUI, like Muhammadiyah and NU, accepts positive law as the criterion for "discovery" of Islamic law (fatwa). All of this is shown by the MUI fatwas in the fields of economy, worship and marriage.

Keywords: Formal Law, Material Law, Islamic Law, Fatwa

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria sumber formil dan materil hukum Islam di Indonesia sebagaimana direpresentasikan dalam fatwa-fatwa Muhammadiyah, NU dan MUI. Metode yang digunakan ialah analisis isi (*content analysis*) yang bersifat deskriptif-evaluatif. Dengan sifatnya yang deskriptif, analisis isi diharapkan dapat menggambarkan sumber formil dan materil hukum Islam di Indonesia sebagaimana adanya, objektif dan mendalam. Dengan sifatnya yang evaluatif, analisis ini diharapkan dapat menyajikan interpretasi kritis tentang kriteria sumber formil dan materil hukum Islam di Indonesia sebagaimana dikeluarkan fatwanya oleh Muhammadiyah, NU dan MUI. Penelitian ini menyimpulkan, bahwa kriteria sumber hukum Islam, baik formil dan maupun materil, dalam fatwa-fatwa Muhammadiyah adalah Alquran, hadits atau *sunnah maqbūlah* (yang dapat

diterima), dan akal pikiran yang selaras dengan rujukan tekstual atau berdiri sendiri asalkan tidak bertentangan dengan Alquran dan *sunnah maqbūlah*. Akal tersebut terkadang bersifat kolektif, artinya dilakukan secara bersama-sama (ijtihad kolektif). Akal pikiran tersebut bisa dinilai dari sisi formil, yaitu mengikuti prosedur atau metode interpretasi hukum Islam yang disepakati, maupun dinilai secara materil dengan mengikuti antara lain *‘urf qānūni* (hukum positif), para ahli kendati bukan ahli hukum, dan bukan ulama internal Muhammadiyah. Akal pikiran tersebut adalah akal pikiran profesional (sesuai masalah) dan akal pikiran publik (sesuai konteks). Semua ini diperlihatkan oleh fatwa-fatwa Muhammadiyah di bidang bisnis, ibadah, dan pernikahan. Kriteria sumber hukum Islam, baik formil maupun materil, dalam fatwa-fatwa NU adalah Alquran, hadits, dan akal pikiran yang selaras dengan *maqāshid sharī’ah* (tujuan syari’at). NU, seperti halnya Muhammadiyah, menerima hukum positif sebagai kriteria hukum Islam, baik formil maupun materil. Semua ini diperlihatkan oleh fatwa-fatwa NU di bidang bisnis, ibadah dan pernikahan. Kriteria sumber hukum Islam, baik formil maupun materil, dalam fatwa-fatwa MUI adalah Alquran, hadits, dan akal pikiran yang selaras dengan *maṣlahah* yang bersifat publik, keumatan dan kebangsaan, *sadd al-dzarī’ah* (“tindakan preventif”). MUI, seperti halnya Muhammadiyah dan NU, menerima hukum positif sebagai kriteria “penemuan” hukum Islam (fatwa). Semua ini diperlihatkan oleh fatwa-fatwa MUI di bidang ekonomi, ibadah, dan bidang pernikahan.

Kata Kunci: Hukum Formil, Hukum Materil, Hukum Islam, Fatwa

A. Pendahuluan

Hukum Islam dapat dimaknai secara ilmiah dan populer, sekaligus multitafsir, dan dapat pula disejajarkan dengan makna fikih dan syariah (syariat) di Indonesia. Mudzhar mengidentifikasi makna referensial hukum Islam menjadi: (1) fikih; (2) putusan peradilan; (3) peraturan perundang-undangan yang diadopsi dari ajaran Islam, dan (4) fatwa.¹ Nasution menyebutkan 5 (lima) makna referensial hukum Islam, yaitu (1) fikih; (2) fatwa; (3) kompilasi; (4) yurisprudensi, dan (5) undang-undang.² Di luar lingkungan akademis, justeru karena popularitasnya, hukum Islam seringkali diidentikkan dengan syariat. Akibatnya, suatu fatwa dari lembaga fatwa, yang dihasilkan melalui ijtihad, bisa dianggap syariat. Anggapan demikian, menurut kalangan tertentu, merupakan kekeliruan atau penyempitan makna syariat yang hakikatnya tak bisa direduksi sebagai dan sebatas hasil ijtihad (fikih atau fatwa). Jika syariat ditambahi dengan kata Islam (syariat Islam), maka hukum Islam yang dimaksud lebih kompleks. Para pengusung syariat Islam memiliki cara pandang yang sangat khas, ideologis dan politis. Nashir menyebut cara pandang mereka itu sebagai “Islam Syariat” yang menimbulkan gerakan militansi yang tinggi.³ Jadi kendati akrab dengan istilah hukum Islam, syariat Islam, fikih dan fatwa, namun umat Islam Indonesia masih menemukan kesulitan, secara praktis dan teoritis, untuk membedakan norma hukum Islam dari yang bukan. Apakah menabung di bank berbasis syariah, atau mencatat pernikahan di Kantor Urusan Agama, termasuk menaati hukum Islam? Jika iya, maka hukum Islam yang mana? Pertanyaan lain: Apakah melanggar lampu merah termasuk membangkangi hukum Islam? Hukum Islam yang mana? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu bisa menggelontor tanpa henti. Salah satu cara untuk mengontrolnya ialah menemukan

¹ Mohamad Atho Mudzhar, *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach*. (Jakarta: Office of Religious Research and Development and Training, Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, 2003), 94.

² Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 189-202.

³ Haedar Nashir, *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia* (Bandung: Penerbit Mizan bekerjasama dengan Maarif Institute for Culture and Humanity, 2013), 590.

dan menyepakati kriteria sumber hukum Islam, baik formil (prosedur, hirarki) maupun materil⁴ (isi, unsur).

Adalah layak diperhatikan, bahwa diskusi tentang kriteria sumber formil dan materil hukum Islam di Indonesia relatif langka dilakukan. Kamus Bahasa Indonesia mengartikan kriteria sebagai ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.⁵ Hukum Islam seolah-olah terbentuk secara alamiah tanpa memiliki kriteria sumber apapun. Alih-alih mengetengahkan kriteria sumber, problem yang sering dikedepankan oleh para ahli antara lain ialah identitas, ideologi, politik, atau positivasi hukum Islam yang didukung oleh beragam teori, misalnya saja *receptie a contrario*.⁶ Ada pengecualian. Penelitian yang memperhatikan unsur formil hukum Islam, misalnya, dilakukan oleh Alfitri, kendati perhatiannya hanya terfokus pada regulasi perbankan syari'ah.⁷ Urgensi meneliti unsur materil hukum Islam diperlihatkan oleh Nurcahyono. Dia mengupas pemikiran Louay Safi yang mengintegrasikan dimensi sosial ke dalam hukum Islam, dan pemikiran al-Zarqa yang mengintegrasikan dimensi ekonomi ke dalam hukum Islam.⁸ Mengingat pengecualian sifatnya, kriteria sumber formil dan materil hanya disinggung sambil lalu dan implisit.

Mengidentifikasi kriteria sumber formil dan materil hukum Islam, serta dinamikanya di Indonesia, cukup mendesak dilakukan. Bahan terpenting dan paling tepat dianalisis ialah fatwa-fatwa Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Alasannya ialah karena di samping bersifat kultural ketimbang struktural (seperti qanun), fatwa relatif lebih otentik untuk melihat perkembangan pemikiran dan praktek hukum Islam di Indonesia, seperti

⁴ Kata formil dan materil dalam literatur hukum berbahasa Indonesia kebanyakan ditulis formil dan materiil sebagai hasil dari transliterasi harfiah bahasa asing namun belum diketemukan di dalam kamus bahasa Indonesia. Untuk selanjutnya ditulis formil dan materil.

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 820.

⁶ Menurut Praja, teori *receptie a contrario* yang dikemukakan oleh Sayuthi Thalib, murid Prof. Hazairin, ini mengatakan, bahwa hukum Islam berlaku bagi umat Islam, sedangkan hukum adat baru berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 81.

⁷ Alfitri, "Expanding A Formal Role for Islamic Law in the Indonesian Legal System: The Case of Mu'amalat", *Journal of Law and Religion* 23 (1), 2007/2008, 249-270.

⁸ Moh. Lutfi Nurcahyono, "Pembaruan Metode Penemuan Hukum Islam: Pendekatan Terpadu Hukum Islam dan Sosial," *Ulumuna Jurnal Studi Keislaman* 16 (1), 2012, 21-40.

dikembangkan oleh lembaga fatwa Muhammadiyah, NU dan MUI. Alasan lain ialah karena fatwa di Indonesia bisa dijadikan dalil atau “dalih” gerakan sosial, bahkan gerakan politik yang disertai semangat militansi yang tak bisa dipandang sebelah mata. Demikianlah GNPf (Gerak Nasional Pengawal Fatwa) MUI “mendalilkan” salah satu fatwa MUI untuk melakukan pengerahan massa dan demonstrasi, kendati kemudian berganti nama menjadi GNPf Ulama pada tahun 2017. Beberapa kriteria sumber hukum Islam yang dapat diidentifikasi dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ketiga lembaga fatwa ternama itu, baik secara formil maupun materi, diharapkan mampu memantik diskusi lebih lanjut.

B. Sumber Hukum Formil dan Materil

Sumber hukum mengandaikan hukum bermula dari titik tolak dan/atau memiliki pusat tertentu. Mengingat tidak semua hal bisa menjadi sumber hukum, maka ada kriteria yang dikonstruksikan untuk mengeluarkan hukum darinya. Para pendukung paham demikian disebut kaum fundasionalis.⁹ Hukum modern yang mengandaikan kebenaran formil dan materil sebenarnya berawal dari kupasan Aristoteles, filsuf Yunani antik, tentang forma (*hyle*) dan materia (*morphe*), yang kemudian dikembangkan oleh Kekaisaran Romawi untuk kepentingan hukum dan lain-lain.¹⁰ Peraturan perundang-undangan modern terbiasa memuat peraturan hukum formil dan materil.¹¹ Proses adjudikasi modern juga bertujuan mencapai kebenaran fundamental, yaitu kebenaran (*truth*) yang idealnya, menurut Summers,

⁹ Anthon F. Susanto, *Hukum Dari Consilience ke Paradigma Hukum Konstruktif-Transgresif* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 136.

¹⁰ Akar pembedaan antara sumber hukum formil dan materil dapat dilacak dalam perkembangan sejarah filsafat Yunani. Aristoteles mengenalkan istilah forma dan materia, dan membedakan antara keduanya secara prinsip. Menurut Aristoteles, prinsip forma dan prinsip materia merupakan proses yang mesti dilalui oleh potensia untuk menjadi aktus. Dia menyebutnya sebagai proses *entelecheia*, yang berasal dari kata *én* (di dalam), *télos* (tujuan) dan *échein* (mempunyai). Dalam bahasa Inggris, *entelecheia* berarti *to have an end in itself* yang selanjutnya dapat diindonesiakan menjadi kesempurnaan yang dapat dicapai. Untuk menjadi aktus atau aktualitas, materi yang semula merupakan potensia membutuhkan forma. Kekaisaran Romawi yang merupakan ahli waris peradaban Yunani, tanpa kecuali pemikiran para filsuf Yunani, mengadopsi pembedaan prinsip forma dan materia. Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan* (Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2019), 9-10.

¹¹ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: P.T. Pradnya Paramita, 1983), 93.

merupakan kebenaran substantif (materil) dan formal.¹² Akan tetapi, sebagian ahli tidak menggunakan istilah hukum formil dan materil. Satjipto Rahardjo, misalnya, menamainya hukum substantif (materil) dan prosedural (formil).¹³ Summers, demikian pula Herbert Liohnel Adolphus Hart, menggunakan istilah lain dengan maksud yang relatif identik. Hart, misalnya, menyebut aturan primer dan sekunder. Aturan pimer adalah aturan yang menentukan perilaku subjek hukum, menetapkan boleh atau tidaknya suatu perbuatan/perilaku. Aturan sekunder ialah aturan yang menetapkan syarat-syarat keberlakuan aturan primer, dan menampakkan sifat yuridis aturan primer. Ada tiga fungsi aturan sekunder: 1) *rule of recognition*, sebagai aturan pengenali; 2) *rule of change*, menetapkan syarat perubahan aturan primer, dan 3) *rule of adjudication*, memproses suatu perkara di pengadilan.¹⁴

Sumber hukum formil ialah sesuatu yang menjadi penentu atau mendeterminasi pembentukan hukum, di mana hukum dapat ditemukan dan/atau dikenali, tempat ditemukannya peraturan dan ketentuan.¹⁵ Algra dan van Duyvendijk mengatakan bahwa kebiasaan, undang-undang, yurisprudensi dan perjanjian, merupakan sumber hukum formil.¹⁶ Ahli lainnya mengatakan sumber

¹² Robert S. Summers, "Formal Legal Truth and Substantive Truth in Judicial Fact-Finding: Their Justified Divergence in Some Particular Cases," *Law and Philosophy* 18, no. 5 (1999): 497.

¹³ Hukum prosedural berisikan perturan tentang tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif. Hukum prosedural sama sekali tidak bisa dipandang remeh. Hal ini penting secara teoritis maupun praktis. Menurut Rahadjo, kekurangan atau kegagalan dalam beracara (berprosedur) di pengadilan berpotensi menimbulkan akibat fatal, kendati salah satu pihak sebetulnya sudah berada pada posisi yang menguntungkan menurut hukum substantif (materil). Arti penting hukum formil atau hukum prosedural dapat dicontohkan oleh pengalaman tradisi *common law*. Dalam tradisi ini, berbagai sengketa hukum bahkan memiliki prosedurnya sendiri, sehingga dijumpai banyak prosedur dan kompleks. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 77-79.

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judiciaprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal* (Jakarta: Kencana 2012), 440.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, Ronny Hanitijo Soemitro, dan A Siti Sotemi, *Materi Pokok Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Karunika Jakarta Universitas Terbuka, 1986), 176..

¹⁶ Kebiasaan merupakan sumber hukum tertua. Kebiasaan disebut juga tradisi. Inilah satu-satunya sumber hukum masyarakat terdahulu yang tidak memiliki pedoman aturan-aturan yang tertulis, diundangkan, atau dicatat. Masyarakat tersebut memiliki aturan yang diwariskan turun-menurun secara lisan atau diam-diam. Sumber hukum formil yang berupa undang-undang dipahami sebagai "suatu peraturan umum yang berasal dari penguasa yang berwenang untuk itu". Undang-undang merupakan sumber hukum terpenting dalam perkembangan hukum tertulis. Peraturan perundang-undangan yang bersifat abstrak atau umum belum otomatis mengarah pada kejadian atau peristiwa konkrit. Peraturan perundang-undangan bukanlah suatu proses konkretisasi. Hal ini menuntut hakim membuat peraturan perundang-undangan tersebut konkrit dan siap-pakai untuk

formil hukum adalah (1) undang-undang (dalam arti luas); (2) yurisprudensi; (3) traktat; (4) hukum adat dan hukum kebiasaan; dan (5) pendapat para sarjana hukum (doktrin).¹⁷ Pengkategorian yang berbeda-beda menandakan konsensus belum tercapai. Jadi wajar jikalau Algra dan van Duyvendijk berpendapat bahwa sumber hukum formil masih diperdebatkan.¹⁸

Sumber materil hukum dipahami sebagai perasaan hukum, keyakinan hukum, baik menurut individu maupun pendapat umum, yang menjadi penentu atau determinan materil yang membentuk hukum, dan menentukan isi dari hukum.¹⁹ Algra dan van Duyvendijk menyatakan bahwa sumber hukum materil ialah faktor-faktor kemasyarakatan yang mempengaruhi pembentukan hukum, berhubungan erat dengan asal usul isi hukum yang berlaku, dan berpengaruh terhadap pembuatan peraturan perundang-undangan, keputusan hakim, dan lain sebagainya. Kedua ahli hukum tersebut menyebutkan tak kurang dari delapan sumber hukum materil, yaitu (1) hubungan sosial; (2) hubungan kekuatan politik; (3) situasi sosial-ekonomis; (4) tradisi; (5) hasil penelitian ilmiah; (6) opini umum; (7) dinamika dunia internasional, dan (8) keadaan geografis.²⁰

C. Sumber Hukum Formil dan Materil Menurut Islam Indonesia

Alih-alih mendiskusikan kriteria sumber hukum formil dan materil, para ahli hukum Islam lebih tertarik mendiskusikan sumber hukum Islam, padahal perbedaan

kejadian atau peristiwa tertentu. Hakim harus menafsir peraturan perundang-undangan, membuat hukum yang konkrit dan relevansinya dengan suatu kejadian atau peristiwa. Adapun perjanjian (atau konvensi atau persetujuan internasional) biasanya memuat aturan tingkah laku bagi negara-negara yang terlibat membuat perjanjian. N.E. Algra dan K. Van Duyvendijk, *Mula Hukum*, 17-25.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, Ronny Hanitjo Soemitro, dan A Siti Sotemi, *Materi Pokok Pengantar Ilmu Hukum*, 177.

¹⁸ N.E. Algra dan K. Van Duyvendijk, *Mula Hukum* (tanpa kota, BinaCipta, 1983), penerjemah J.C.T. Simorangkir, 16-17.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, Ronny Hanitjo Soemitro, dan A Siti Sotemi, *Materi Pokok*, 176.

²⁰ Hubungan sosial mencakupi perbedaan penguasaan terhadap benda, perbedaan pengetahuan dan lain sebagainya. Hubungan kekuatan politik mencakupi misalnya kepentingan partai politik tertentu, partai pemenang pemilu, atau hubungan politik dengan kelompok penekan (*pressure-groups*). Situasi sosial-ekonomis mencakupi ambang batas harga misalnya. Tradisi mencakupi pendapat keagamaan, moral, dan tradisi hukum. Hasil penelitian ilmiah mencakupi hasil penelitian kriminologis, penelitian yuridis, dan lainnya. Opini umum seringkali merupakan resultante dari kelima sumber sebelumnya. Dinamika dunia internasional mencakupi hak bangsa lain, pengaruh dari organisasi internasional, dan lain sebagainya. Contoh keadaan geografis ialah Indonesia yang merupakan negara kepulauan atau negara maritim. N.E. Algra dan K. Van Duyvendijk, *Mula Hukum*, 16.

formil dan materil memiliki basis historis yang kuat dalam sejarah hukum Islam. Coulson, ketika menganalisis hukum dan moralitas yang mewarnai sejarah hukum Islam, menemukan dua pendekatan. Pertama, pendekatan moralis²¹ yang menyatakan bahwa akibat dari suatu perbuatan harus bergantung pada motif/maksud yang menginspirasi perbuatan tersebut. Dia menduga banyak pendukung Mazhab Hanbali konsisten menggunakan pendekatan moralis. Kedua, pendekatan formalis yang menyatakan bahwa hukum tidak menggali kedalaman pikiran subjek hukum, melainkan harus menerima dan meregulasi perbuatan subjek hukum sebagaimana “nilai permukaan”-nya (*at their face value*) saja. Menurut Coulson, pendekatan formalis merupakan karakteristik umum fikih Mazhab Hanafi.²² Perbedaan antara pendekatan moralis dan formalis ala Coulson merepresentasikan perbedaan hukum materil (atau moralis) dan formil (formalis).

Sebagian ahli hukum Islam Indonesia tidak membedakan sumber hukum formil dan materil. Moenawar Kholil, misalnya, menyatakan bahwa Alquran dan hadis/sunnah adalah sumber hukum materil (*maṣādir al-aḥkām*) dan formil (*adillah al-ah{kām*) sekaligus.²³ Wilayah kajian Alquran meliputi sejarah hingga kemukjizatan Alquran.²⁴ Wilayah kajian sunnah meliputi kriteria *sanad* (mata rantai) dan *matan* (isi) hadis agar dapat diterima sebagai dalil (hukum).²⁵ Sebagian

²¹ Noel J. Coulson, *Conflict and Tensions in Islamic Jurisprudence* (Chicago & London, The University of Chicago Press, Chicago, The University of Chicago Press, Ltd., London W.C.I, 1969), 86-87.

²² Pendekatan moralis dan formalis dapat dipahami secara lebih tepat dengan mengemukakan contoh, misalnya saja ikatan pernikahan. Jika seorang pria dan wanita melangsungkan pernikahan dengan memenuhi semua rukun dan syarat pernikahan, tetapi dengan niat (motiv atau maksud) akan bercerai dalam jangka waktu tertentu, maka ikatan pernikahan itu sah menurut pendekatan formalis yang tidak menggali kedalaman pikiran atau motif subjek hukum, tetapi tidak sah menurut pendekatan moralis yang menggantungkan perbuatan pada hal-hal yang menginspirasinya.

²³ Lihat Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer* (Depok: Gramata Publishing, 2011), 89-90

²⁴ Nasution membagi wilayah kajian Alquran menjadi: 1) sejarah ilmu Alquran; 2) *asbab al-nuzul*; 3) *makki wa al-madani*; 4) *fawatih al-suwar*; 5) *qira'at*; 6) *al-nasikh wa al-mansukh*; 7) *rasm al-Qur'an*; 8) *muḥkam wa mutashābih*; 9) *amtsal al-Qur'an*; 10) *aqsam al-Qur'an*; 11) *qashash al-Qur'an*; 12) *jadl al-Qur'an*; 13) ilmu tafsir; 14) metode yang digunakan penafsir; 15) *i'jaz al-Qur'an*. Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 120-121.

²⁵ Metode yang dapat digunakan ialah metode perpaduan antara metode induktif yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman kontekstual hadits (nash) dengan pendekatan fenomenologi yang digunakan untuk menemukan substansi ajaran hadits (nash). Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, 160-161.

lain membedakan sumber hukum formil dan materil, kendati keduanya merupakan satu kesatuan. Arto, misalnya, mewakili kelompok kedua ketika menyatakan bahwa dua di antara empat kelompok objek peraturan terapan tertulis ialah hukum materil (“materil”) dan formil (“formil”).²⁶

Diskusi semakin meluas ketika sumber hukum Islam dipandang mencakupi selain Alquran dan hadis/sunnah. Ali, misalnya, menambahkan akal pikiran (*ra'yu*), baik dalam pengertian formil maupun materil, sebagai sumber hukum Islam, yaitu akal pikiran manusia yang berijtihad. Dengan demikian, sumber hukum Islam ialah (1) Alquran (yang berasal dari Allah), (2) Hadis/Sunnah (yang dirujukan kepada Rasul-Nya), dan (3) akal pikiran manusia (*ra'yu*) yang memenuhi syarat berijtihad dengan metode tertentu.²⁷ Akal pikiran manusia berikhtiar dengan seluruh kemampuan untuk memahami kaidah hukum fundamental dalam Alquran, kaidah hukum umum dalam sunnah, dan merumuskannya menjadi garis hukum yang dapat diaplikasikan pada kasus tertentu.²⁸ Akal pikiran atau *ra'yu* terkadang disebut juga ijtihad.²⁹

²⁶ Hukum formil, sebagai hukum terapan, ialah hukum yang mengatur tata cara atau prosedur pelaksanaan hukum materil. Nama lain hukum formil ialah hukum prosedural. Demikianlah suatu perkawinan harus dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat nikah, atau ikrar wakaf mesti dilaksanakan di hadapan petugas yang berwenang, dan perbuatan atau perilaku hukum lainnya sesuai dengan prosedurnya. Menurut Arto, pelanggaran terhadap hukum formil atau prosedur ini ialah bahwa perbuatan hukum atau relasi hukum tidak berkekuatan hukum. Dengan demikian perkawinan tidak akan memiliki kekuatan hukum kecuali setelah perkawinan tersebut dicatat oleh petugas yang berwenang. Demikian pula halnya dengan ikrar wakaf dan lain sebagainya. Adapun hukum materil, sebagai hukum terapan, ialah hukum yang mengatur perilaku (perbuatan) subjek hukum dan relasi hukum antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya, atau antara subjek hukum dengan suatu benda, baik benda berwujud (fisik) maupun tidak (nonfisik). Contohnya antara lain hukum perkawinan, waris, wasiat, hibah, dan ekonomi syariah. Hukum materil memuat aturan tentang syarat, rukun, dan tata cara melakukan perbuatan hukum, seperti perkawinan, hibah dan seterusnya. Tidak dipatuhinya atau dilanggarnya hukum materil akan berakibat hukum pula seperti tidak sahnya perbuatan hukum, batalnya relasi hukum, dan akibat-akibat hukum lainnya. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan Buku Kedua* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 133-134.

²⁷ Antara lain ialah *ijmā'*, *qiyās*, *istidlāl*, *al-maṣāliḥ al-mursalah*, *al-istiḥsān*, *al-istiḥāb*, dan *al-'urf*. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), 71-72.

²⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, 101.

²⁹ Metode ijtihad antara lain ialah: (1) *ijmā'* (persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli tentang satu masalah pada tempat dan waktu tertentu), (2) *qiyās* (menyamakan hukum karena ada persamaan 'illah (penyebab/alasan), (3) *istidlāl* (menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan), (4) *al-maṣāliḥ al-mursalah* (menemukan hukum yang tak terdapat dalam Alquran dan sunnah berdasarkan pertimbangan kemasalahan masyarakat atau kepentingan umum), (5) *istiḥsān* (menemukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang ada demi keadilan dan

Diskusi tentang sumber materil hukum Islam, dalam arti hukum substantif yang antara lain dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial-kemasyarakatan dan politik, telah berkembang sedemikian rupa karena luasnya pengalaman interaksi hukum Islam dengan tradisi hukum lain. Hukum Islam masa pra kemerdekaan, berinteraksi dengan hukum adat dan hukum Barat, khususnya Belanda. Hukum Islam modern, pasca kemerdekaan, berinteraksi pula, bahkan diadopsi dan/atau diintegrasikan, dengan hukum nasional. Mudzhar dan Nasution sudah menyebutkan makna referensial hukum Islam secara nasional, seperti fatwa, fikih dan peraturan perundang-undangan. Arto, karena interaksinya sebagai seorang hakim dengan hukum nasional lebih intens, menambahkan rincian. Menurut Arto, dilihat dari sistem hukum nasional, hukum Islam memiliki struktur hukum materil yang berjenjang, yaitu 1) Nilai-nilai (prinsip-prinsip) dasar; 2) Hukum Islam terapan dalam bentuk ayat dan hadis *al-ahkām* (hukum-hukum); 3) Asas-asas (kaidah-kaidah) hukum Islam; 4) Hukum Islam dalam bentuk Fatwa MUI dan lainnya; 5) Hukum Islam terapan dalam bentuk hukum positif; 6) Hukum Islam dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberlakuan hukum Islam dan umat Islam; 7) Hukum Islam dalam bentuk kompilasi hukum; 8) Hukum Islam terapan dalam bentuk tidak tertulis; 9) Hukum Islam dalam bentuk tradisi atau adat istiadat yang hidup dalam masyarakat muslim; 10) Hukum Islam dalam bentuk Putusan Basyarnas; 11) Hukum Islam dalam bentuk yurisprudensi; 12) Hukum Islam dalam bentuk sunnatullah, dan 13) Hukum Islam dalam bentuk putusan hakim dalam lingkungan Peradilan Agama.³⁰

D. Metode Meneliti Kriteria Sumber Hukum Formil dan Materil

Agar diskusi tentang kriteria sumber hukum formil dan materil hukum Islam Indonesia berjalan sistematis diperlukan metode atau cara menjalankannya. Pertama-tama ialah menentukan sumber data dan teknik menggali data. Sumber data diperoleh atau berasal dari lembaga fatwa MUI, Muhammadiyah dan NU, yang memuat isi atau diktum tentang sumber formil dan materil hukum Islam. Jadi

kepentingan sosial), (6) *istiḥāb* (menetapkan hukum menurut keadaan atau peristiwa yang terjadi sebelumnya hingga ditemukan dalil yang mengubahnya, dan (7) adat istiadat atau '*urf*' yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, 104, 108-111.

³⁰ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam*, 322-332

kriteria sumber formil dan materil hukum Islam akan didapati di dalam kumpulan fatwa MUI,³¹ Muhammadiyah³² dan NU.³³ Langkah berikutnya ialah mengklasifikasi dan memvalidasi kriteria sumber formil dan materil hukum Islam dan mendeskripsikannya sedemikian rupa. Dengan sifatnya yang deskriptif, metode yang relevan digunakan ialah analisis isi. Tujuannya ialah agar kriteria sumber formil dan materil hukum Islam tergambar sebagaimana adanya, objektif dan mendalam.

Mengingat masalah kriteria berkarakteristik filosofis, sehingga selain mendeskripsikan kriteria sumber hukum formil dan materil dari ketiga lembaga fatwa, diperlukan evaluasi kritis yang berulang. Evaluasi kritis yang berulang akan cukup untuk memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan tidak dogmatis, melainkan terbuka menerima masukan dan kritik selama analisis berlangsung. Oleh karena itu, data primer diperkaya dengan data sekunder yang mencakupi literatur filosofis dan kaidah hukum Islam.

E. Kriteria Sumber Formil dan Materil Hukum Islam Muhammadiyah

Muhammadiyah dikenal tidak bermazhab, dijuluki Islam modernis, dan dikenal dengan semboyan kembali kepada Alquran dan Sunnah. Maksud dari kembali kepada Alquran dan Sunnah ialah ajakan untuk memahami dan mengamalkan agama Islam langsung dari sumber pokoknya, yaitu Alquran dan Sunnah, secara berkesinambungan, dengan ijtihad sesuai yang diperintahkan kedua sumber pokok itu, bukan berorientasi kepada orang.³⁴ Orang yang dimaksud mencakupi para ulama. Jika berkenaan dengan ulama, demikian pula mazhab, menurut fatwa lainnya, akan dilakukan penilaian terhadap pendapat (ulama dan

³¹ Ma'ruf Amin, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011).

³² Tim Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 1-8*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah).

³³ (1) Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, *Aḥkām al-Fuqahā' fī Muqarrāt Mu'tamar Nahdlatul al-Ulamā': Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M.)*, penerj. H.M. Djamaluddin Miri (Surabaya: (LTN) NU Jawa Timur bekerjasama dengan "Khalista" Surabaya, 2007); dan (2) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-hasil Mukhtamar 32* (Jakarta: Sekretariat Jendral PBNU, 2011).

³⁴ Selengkapnya lihat "Masalah Qur'an dan Hadis, Fatwa No 1 Arti Kembali Kepada Alquran dan Hadis." Tim Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 2* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015), 28.

mazhab) yang memiliki dasar yang kuat untuk dipilih. Demikian ini dikenal dengan metode tarjih.³⁵ Lembaga yang menerapkan metode tarjih disebut Majlis (Majelis?) Tarjih. Fatwa Majlis Tarjih lainnya kembali menguatkan Hasil Keputusan Mukhtar Tarjih, bahwa "... dasar-dasar untuk menetapkan hukum... adalah al-Qur'an dan al-Sunnah."³⁶ Penguatan demikian tidak berarti membatalkan ijtihad yang sudah mendapat pengakuan. Fatwa lain menyatakan ijtihad dan/atau *istinbāt* diakui sebagai "sumber" di mana hukum bisa ditemukan justeru karena tidak ada nashnya (Alquran dan Sunnah) secara langsung.³⁷ Jadi ijtihad dan/atau *istinbāt* merupakan sumber hukum formil.

Seluruh teks Alquran diterima tanpa keraguan apapun. Fakta tekstualitas Alquran adalah kriteria sumber formil itu sendiri. Hal ini berbeda Sunnah/Hadis. Sunnah yang dapat dijadikan hujah adalah *sunnah maqbulah*, yaitu Sunnah yang dapat diterima sebagai hujah agama, baik berupa hadis sahih maupun hadis *hasan* (harfiah: baik),³⁸ atau disebut hujah syar'iyah oleh salah satu fatwa,³⁹ atau yang dapat diterima sebagai dasar hukum menurut fatwa lain.⁴⁰ Bagaimana kriteria ijtihad dan/atau *istinbāt*? Salah satu fatwa Majlis Tarjih menyatakan:

"b. Ijtihad jama'iy ialah ijtihad yang dilakukan secara kolektif, yaitu sekelompok ahli dalam hukum Islam yang berusaha mendapatkan hukum

³⁵ Selengkapnya lihat "Masalah Ketarjihan, Fatwa No 2 Muhammadiyah Bermazhab Tarjih?" Tim Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 3* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017), 226.

³⁶ Selengkapnya lihat "Masalah Ketarjihan, Fatwa No 1 Masalah Ketarjihan". Tim Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 3*, 225.

³⁷ "... bahwa Majlis dalam beristidlal dasar utamanya adalah al-Qur'an as-Sunnah. Ijtihad dan istinbad [sich] atas dasar *illah* terhadap hal-hal yang tidak terdapat di dalam nash dapat dilakukan sepanjang tidak menyangkut bidang *ta'abbudi*, dan memang merupakan hal yang sangat diwajibkan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan kata lain, Majlis Tarjih menerima ijtihad, termasuk qiyas sebagai cara dalam menetapkan hukum yang tidak ada nashnya secara langsung." Lihat "Masalah Ketarjihan, Fatwa No 3 HPT Mazhab Ke Lima." Tim Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 3*, 228, 230.

³⁸ Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX, 2018), 19.

³⁹ Selengkapnya lihat "Masalah Ketarjihan, Fatwa No 1 Masalah Ketarjihan". Tim Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 3*, 231.

⁴⁰ Lihat "Masalah Ke-Tarjihan, Fatwa No 5 Dalil Keputusan Majlis Tarjih." Tim Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 2* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015), 218.

sesuatu atau beberapa masalah hukum Islam. Ijtihad semacam ini telah dilakukan sejak zaman sahabat seperti musyawarah penetapan Abu Bakar sebagai Khalifah, pengumpulan Al-Qur'an di masa Khalifah Abu Bakar, penulisan Al-Qur'an di masa khalifah Usman Bin 'Affan. Karena merupakan kesepakatan seluruh ummat mujtahidin disebut ijma'. Usaha mencari ketetapan hukumnya disebut ijtihad. Karena dilakukan oleh sekelompok maka dinamakan ijtihad jama'iy."⁴¹

Majlis Tarjih menegaskan bahwa ijtihad kolektif atau jama'iy melibatkan ulama di luar Muhammadiyah.

“Di kalangan Muhammadiyah dalam usaha mencari penentuan hukum sesuatu masalah hukum yang akan diamalkan, dilakukan dengan cara ijtihad jama'iy ini, yang dilaksanakan oleh lajnah tarjih, dalam suatu muktamar yang dihadiri anggota Lajnah Tarjih seluruh Indonesia. Yang hadir dalam muktamar tidak hanya ulama Muhammadiyah saja, tetapi juga mengundang ulama di luar Muhammadiyah”⁴²

Suatu masalah akan ditinjau dari berbagai aspek, yang melibatkan ahli hukum dan ahli lain terkait masalah yang dibahas. Pemahaman terhadap dalil yang mempunyai makna yang belum jelas atau tidak tegas dilakukan bersama.⁴³ Dengan demikian, berdasarkan fatwa Majlis Tarjih, kriteria sumber formil hukum Islam, khususnya ijtihad, ialah kolektivitas yang terdiri dari ulama dan/atau kalangan ahli/profesional sehingga diperoleh pemahaman komprehensif, yang barangkali lebih banyak diterapkan ketika Muktamar untuk menghasilkan Putusan Tarjih.⁴⁴

Kriteria sumber formil hukum dapat dibedakan, kendati terkadang sulit dipisahkan, dari kriteria sumber materil hukum. Demikian pula halnya dengan sumber formil dan materil hukum. Rupanya tradisi, hubungan sosial, situasi sosial-

⁴¹ Selengkapnya lihat “Masalah Ke-Tarjihan, Fatwa No 4 Ijtihad Jama'iy.” Tim Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 2* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015), 217.

⁴² Selengkapnya lihat “Masalah Ke-Tarjihan, Fatwa No 4 Ijtihad Jama'iy.” Tim Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 2*, 217.

⁴³ Selengkapnya lihat “Masalah Ke-Tarjihan, Fatwa No 5 Dalil Keputusan Majlis Tarjih.” Tim Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 2*, 217-218.

⁴⁴ Putusan merupakan salah satu dari tiga produk Tarjih, yaitu (1) wacana (pemikiran keislaman); (2) fatwa, dan (3) putusan. Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, 19.

ekonomis, opini umum dan keyakinan hukum, yang merupakan sumber-sumber materil hukum dalam hukum konvensional yang, seperti sudah dikatakan, telah lama berinteraksi dengan hukum Islam di Indonesia itu, adalah juga sumber-sumber materil fatwa-fatwa Majelis Tarjih, seperti fatwa antara lain di bidang bisnis (jual beli), ibadah dan pernikahan.

1. Bidang Bisnis (Jual beli). Majelis Tarjih menggunakan *'urf* sebagai dasar hukum jual beli buah-buahan yang masih berada di pohon. Setelah mengemukakan hadis-hadis terkait, Majelis Tarjih menyimpulkan jual beli tersebut diperbolehkan apabila sudah jelas bahwa buah-buahan di pepohonan itu baik, dapat dimanfaatkan, dan tidak menimbulkan kerugian yang nyata, khususnya bagi pembeli yang belum memiliki pengetahuan yang jelas tentang buah yang akan dibeli.

“Dengan kata lain, kebolehan jual-beli buah-buahan yang masih ada di pohon di kala sudah jelas baik dalam arti masak, selain tidak bertentangan dengan makna hadis di atas juga dapat didasarkan kepada *'urf* kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang membawa kelancaran *mua'alah*.”⁴⁵

Salah satu asas muamalah, yang berarti pula asas jual beli, menyatakan semua perbuatan boleh dilakukan sepanjang belum ada dalil yang melarangnya. Sebaliknya ialah asas ibadah; segala sesuatu dilarang kecuali ada dalil yang membolehkannya. Berdasarkan asas muamalah, jual beli buah-buahan yang terlihat jelas baik adanya, kendati masih berada di pohon, boleh dilakukan karena (1) tidak dilarang atau bertentangan dengan hadis, (2) merupakan kebiasaan (*'urf*) yang berlaku di masyarakat, dan (3) kelancaran bertransaksi (*muā'alah*). Jika *'urf* (atau tradisi) adalah sumber materil hukum, maka kelancaran bermuamalah, yaitu bermuamalah dalam pengertian hubungan sosial atau sosial-ekonomis, adalah salah satu kriteria sumber materil fatwa sebagaimana juga dijelaskan dalam diktum fatwa Muhammadiyah.

Majlis Tarjih menerima dan memberlakukan *'urf* seperti *naş* sebagaimana dimaksud oleh salah satu kaidah hukum Islam sebagai berikut:

⁴⁵ Selengkapnya lihat “Masalah Bunga, Gadai dan Suap, Fatwa No 7 Menjual Hasil Pertanian di Pohon.” Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 1* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015), 181-182.

“Apa yang ditentukan oleh *al-‘urf* sama seperti apa yang ditentukan oleh *al-nas*”⁴⁶

Praktik ketarjihan, menurut Syamsul Anwar, mengakui *‘urf* sebagai salah satu sumber paratekstual atau instrumental, dan memandang ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat sebagai *‘urf qanūnī* asalkan tidak bertentangan dengan *naṣ ṣarīḥ* (jelas, tegas, lugas).⁴⁷ Bahkan, menurut Ketua Majelis (Majlis?) Tarjih PP Muhammadiyah 2015-2020 itu, kendati terdapat *naṣ* namun perlu ditafsir ulang demi mewujudkan kondisi yang lebih maslahat.⁴⁸ Apa yang lebih maslahat dalam jual beli buah-buahan yang masih berada di pohon, yang diakui *‘urf* itu? Jelas kiranya bahwa Majelis Tarjih tidak bermaksud menerima dan menggunakan semua *‘urf* sebagai sumber materil hukum jual beli buah-buahan yang masih berada di pohon, kecuali *‘urf* yang memenuhi beberapa kriteria materil, yaitu kelancaran bertransaksi, opini/keyakinan umum tentang baiknya kualitas buah, dapat dimanfaatkan, dan tidak menimbulkan kerugian yang nyata.

2. Bidang Ibadah. Majelis Tarjih memfatwakan bahwa pelaksanaan salah satu ibadah murni (*maḥḍah*), yaitu shalat iftitah dua rakaat dalam shalat Lail/Tarawih, dapat dilaksanakan oleh umat atau masyarakat Islam secara berjamaah atau sendiri-sendiri. Opsi pelaksanaan shalat iftitah dua rakaat difatwakan justeru karena Majelis Tarjih tidak menemukan Sunnah yang mengaturnya. Kendati merupakan ibadah *maḥḍah* yang seharusnya selalu didasarkan pada tuntunan teks, Alquran dan/atau *Sunnah Maqbulah*, namun shalat iftitah dua rakaat ini dilaksanakan menurut pilihan jamaah atau individu.

⁴⁶ Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā’, *Al-Fiqh al-Islāmī fī Thaḥbihi al-Jadīd*, (Damaskus: Alif Ba’ al-Adīb, 1968), jilid 2, 1001.

⁴⁷ Sumber instrumental lainnya ialah ijmak, qiyas, *maṣlahah mursalah*, *istiḥsān*, dan tindakan preventif (*sad al-zarī’ah*). Ijmak tidak mungkin diabaikan, karena manusia sebagai makhluk sosial, bermasyarakat, tidak pernah terlepas dari adanya kesepakatan-kesepakatan dalam beberapa aspek kehidupan, termasuk beberapa masalah keagamaan. Qiyas bukan semata proses, analogi, melainkan juga *al-istiḥsān* (kesamaan). Qiyas adalah kesamaan suatu kasus dengan kasus yang sudah ditegaskan hukumnya dalam nas. *Maṣlahah mursalah* digunakan antara lain mengenai fatwa tentang keharusan dilakukannya perceraian di depan sidang pengadilan. *Sad al-zarī’ah* digunakan antara lain untuk melarang wakaf untuk hal-hal yang bersifat maksiat atau dapat menimbulkan fitnah. Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, 22-25.

⁴⁸ Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, 25.

“Oleh karena tidak adanya ketentuan dalam Sunnah cara bagaimana pelaksanaannya, maka pelaksanaannya diserahkan pada jamaah masing-masing, dapat dilakukan berjamaah dan dapat pula dilakukan sendiri-sendiri.”⁴⁹

Jelas kiranya, opsi apapun yang dipilih tetap saja tidak berdasarkan pada petunjuk Allah yang diwahyukan (Alquran), dan tidak mengacu pada tuntunan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad (*Sunnah Maqbulah*). Jika dilaksanakan berjamaah, maka pelaksanaannya tanpa rujukan tekstual. Demikian pula halnya jika dilaksanakan secara individual. Padahal hukum asal ibadah *maḥḍah* adalah *al-tauqīf*. Shalih bin Abdullah bin Hamid menjelaskan:

الأصل في العبادات التوقيف فلا يتعبد الله الا بما شرع الله و على لسان رسوله محمد صلى الله عليه واله و سلم فان العبادة حق خالص لله تعالى قد طلبه من عباده بمقتضى ربوبيته لهم و كيفية العبادة و هيئتها و التقرب بها لا يكون الا على الوجه الذي شرعه و اذن به

“Hukum asal dalam masalah ibadah adalah tauqif (mengikuti ketentuan dan tata cara yang telah ditetapkan oleh syariah). Karena itu, tidak dibenarkan beribadah kepada Allah kecuali dengan peribadatan yang telah disyariatkan oleh Allah dalam kitab-Nya dan melalui penjelasan Rasul-Nya, Muhammad SAW. Hal itu karena ibadah adalah hak murni Allah yang Ia menuntut dari para hamba-Nya berdasarkan sifat rububiyah-Nya terhadap mereka. Tata cara, sifat, dan ber-taqarrub (melakukan pendekatan diri kepada Allah) dengan ibadah hanya boleh dilakukan dengan cara yang telah disyariatkan dan diizinkan-Nya.”⁵⁰

Jika konsisten dengan hukum asal ibadah *maḥḍah*, maka aturan pelaksanaan shalat iftitah dua rakaat dalam shalat Lail/Tarawih, karena tidak memiliki rujukan langsung pada Alquran dan Sunnah, sebenarnya belum memiliki dalil. Bagaimana dengan ijtihad? Jamaah pada umumnya adalah orang awam, bukan kumpulan para ahli ijtihad. Jadi, ketika pilihan opsional diserahkan kepada jamaah, Majelis Tarjih secara implisit mengakui opini atau keyakinan jamaah sebagai sumber materil hukum pelaksanaan shalat iftitah dua rakaat dalam shalat

⁴⁹ Selengkapnya lihat “Masalah Shalat Sunat, Fatwa No 3 Shalat Iftitah pada Shalat Lail.” Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama* 1, 91.

⁵⁰ Teks Arab dan terjemahan dikutip dari Ma’ruf Amin, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 212.

Lail/Tarawih. Sumber hukum ibadah *maḥḍah*-nya bukan sumber formil. Kriteria sumber materil fatwanya bukan teks yang terukur di dalam sumber formil yang diakui seperti Alquran dan *Sunnah Maqbulah*, melainkan pada konteks yang ditetapkan di dalam keyakinan hukum menurut umum.

3. Bidang Pernikahan. Majelis Tarjih berpendapat, *nikah sirri* dikenal luas di Indonesia setelah diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975. Nikah sirri ialah pernikahan yang dilakukan oleh wali dan disaksikan oleh saksi nikah, namun tidak diselenggarakan di hadapan Petugas Pencatat Nikah yang resmi, atau suatu perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi penganut agama Islam, atau di Kantor Catatan Sipil bagi nonmuslim, sehingga mereka tidak memiliki Akta Nikah. Pertanyaannya ialah apa hukum mencatatkan perkawinan bagi umat Islam? Majelis Tarjih berfatwa:

“... maka bagi warga Muhammadiyah, wajib hukumnya mencatatkan perkawinan yang dilakukannya. Hal ini juga diperkuat dengan naskah Kepribadian Muhammadiyah sebagaimana diputuskan dalam Mukhtamar Muhammadiyah ke-35, bahwa di antara sifat Muhammadiyah ialah “mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah”.⁵¹

Kendati ditujukan khusus kepada warga Muhammadiyah, namun fatwa Majelis Tarjih terbuka untuk diikuti oleh umat Islam secara keseluruhan. Pertimbangan-pertimbangan Majelis Tarjih yang mewajibkan perkawinan dicatat secara resmi, kendati hukum Islam pada awalnya tidak secara konkrit mengaturnya, adalah (1) Peraturan perundang-undangan; (2) Dasar dan falsafah negara Indonesia; (3) Kemaslahatan, manfaat atau kebaikan besar bagi masyarakat; (4) Ketertiban pelaksanaan perkawinan; (5) Prevensi hukum agar tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan; (6) Diqiyaskan dengan *mudayanah* (hutang-piutang) tertentu yang harus dicatat, apalagi akad nikah

⁵¹ Selengkapnya lihat “Seputar Munakahat dan Keluarga, Fatwa No 5 Hukum Nikah Sirri”. Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama* 8 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017), 52.

yang begitu luhur, agung, dan sakral.⁵² Konsideran fatwa Majelis Tarjih didominasi oleh kriteria sumber materil, seperti kemaslahatan, manfaat, kebaikan, ketertiban dan prevensi, ketimbang sumber formil hukum Islam.

F. Kriteria Sumber Formil dan Materil Hukum Islam NU

NU dikenal mengamalkan taklid dan bermazhab, dan sering diidentifikasi Islam tradisional. Sedemikian kuatnya pengaruh taklid, khususnya taklid kepada para ulama Mazhab Syafi'i, NU mengakui bahwa jaman sekarang, setidaknya hingga Mukhtamar Ke-32 Tahun 2010, *itsbatul ahkam* tidak dimaksudkan sebagai aktifitas menetapkan hukum yang langsung bersumber dari Alquran dan Hadis. Sebabnya ialah karena hanya ulama terkategori mujtahid yang bisa melakukannya. Maksud dari *itsbatul ahkam* ialah menetapkan hukum dengan cara men-*tathbiq*-kan (mencocokkan/menerapkan) secara tepat dan dinamis *qaul* ("opini hukum") dan *'ibarah* ("narasi hukum") terutama dari *kutub mu'tamadah* ("kitab-kitab sandaran") Mazhab Syafi'i.⁵³ Kendati memastikan dasar hukum ialah Alquran dan Hadis, namun kedua sumber ajaran Islam itu tidak bisa dirujuk oleh sembarang orang. Merujuk Alquran dan Hadis berarti mengikuti para ulama yang merujuk keduanya. Status pendapat para ulama kurang lebih sama dengan status pendapat sarjana hukum yang merupakan, menurut hukum konvensional, sumber hukum formil.

"... karena pada hakikatnya setiap hukum pasti berdasarkan al-Qur'an, al-Hadits dan dalil-dalil syara' lainnya, dengan ketentuan bahwa ayat al-Qur'an, al-Hadits dan dalil-dalil syara' lainnya tersebut merupakan bagian dari pendapat Ulama yang terdapat dalam kutub mu'tamadah."⁵⁴

Hal ini berkonsekuensi pada makna dalil hukum Islam. Alqur'an dan hadis bukanlah dalil yang mandiri, melainkan bagian dari ijtihad ulama.⁵⁵ Jika ulama tidak/belum menggunakan kedua sumber hukum Islam tersebut sebagai dalil, maka "Apakah NU menggunakan akal pikiran?"

NU menerima akal pikiran ketika melakukan *istinbāt al-ahkam* ("penemuan hukum Islam"). Akal pikiran yang dibimbing oleh metode-metode

⁵² Selengkapnya lihat "Seputar Munakahat dan Keluarga, Fatwa No 5 Hukum Nikah Sirri". Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama* 8, 49-51.

⁵³ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-hasil Mukhtamar* 32, 215.

⁵⁴ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-hasil Mukhtamar* 32, 216.

⁵⁵ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-hasil Mukhtamar* 32, 216.

“penemuan hukum” tertentu. Pertama, *ilhaqul-masail bi nadha’iriha*. Maksud substansial metode ini ialah mengikutsertakan masalah yang dihadapi dengan yang serupa dan sudah diputuskan hukumnya. Metode *ilhaqul-masail bi nadha’iriha* mendekati apa yang disebut yurisprudensi, yang merupakan salah satu sumber formil hukum menurut hukum konvensional. Kedua, jika metode pertama tak dapat dilakukan, maka digunakan metode *bayānī*, *qiyāsī*, dan *istiṣlāḥī* atau *maqāshidī* sebagaimana diputuskan oleh Mukhtar Ke-33 Tahun 2015.⁵⁶

Metode *bayānī*, menurut hasil Mukhtar Ke-33, adalah metode pengambilan hukum dari *nash* (Alquran dan Sunnah). Ada lima langkah metode *bayānī*, yaitu (1) mengkaji *sabab al-nuzul/wurud*, baik yang makro atau yang mikro; (2) mengkaji teks ayat/hadis perspektif kaidah bahasa (*al-qawā’id al-ushuliyah al-lughawiyah*); (3) mengaitkan *nash* yang sedang dikaji dengan *nash* lain yang berkaitan (*rabth al-nushush ba’dlu’ha bi ba’dlin*). (4) mengaitkan *nash* yang sedang dikaji dengan *maqashid al-syarī’ah* (*rabth al-nushush bi al-maqashid*). *Maqashid al-syarī’ah* berarti tujuan umum syariat yang sekaligus merupakan *kulliyah al-syarī’ah* (totalitas *syarī’ah*) memiliki hubungan saling terkait dengan *nushūsh al-syarī’ah*; dan (5) mentakwil *nash* (*ta’wil al-nushush*) bila diperlukan. Metode *qiyāsī* berarti ijtihad melalui pendekatan qiyas. Qiyas, masih menurut hasil Mukhtar, adalah “... salah satu sumber hukum yang paling subur...” guna menyelesaikan masalah-masalah yang ketentuan hukumnya tidak termaktub secara eksplisit dalam Alquran dan Sunnah, tetapi memiliki *ashl* (induk) di dalam *nash* dan atau ijmak ulama. Hukum yang bisa diperluas jangkauannya melalui qiyas hanyalah hukum yang *ma’qūl al-ma’nā* yang ditandai dengan adanya *‘illat* (alasan hukum) yang melandasi perluasannya. Metode *istiṣlāḥī* berarti ijtihad yang mengacu pada *maqashid al-syarī’ah*, yaitu tujuan-tujuan umum pensyariaan, sehingga bisa disebut juga ijtihad *maqashidī*. Syariat Islam dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia *zhāhir-bāṭin*, dan dunia-akhirat, sehingga perumusan hukum dari *nash* harus sejalan dengan kemaslahatan manusia yang diasumsikan

⁵⁶ Selengkapnya lihat “Keputusan Mukhtar Ke-33 Nahdlatul Ulama Nomor: 006/MNU-33/VIII/2015 Tentang Baḥsul Masail Ad-Diniyyah Al-Maudlu’iyyah Nahdlatul Ulama, I. Metode Istiḥṣān Al-Aḥkām Dalam NU” dalam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-Hasil Mukhtar Ke-33 Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Lembaga Ta’lif wan Nasr PBNU, 2016), 153.

tidak bertentangan dengan *nash*.⁵⁷ Pada hakikatnya, dalil-dalil sekunder seperti *istihsān*,⁵⁸ *maṣlahah mursalah*,⁵⁹ dan ‘urf⁶⁰ merujuk pada *maqāṣid al-syarī’ah*.

Metode-metode “penemuan hukum Islam”, yang sangat sulit untuk menolak intervensi akal pikiran di dalamnya itu, baik *ilhaqul-masail bi nadha’iriha* maupun metode *bayānī*, *qiyāsī*, dan *istiṣlāhī* atau *maqāṣidī*, rupanya mengandaikan keterlibatan para ahli secara kolektif (berjamaah) agar terhindar dari despotis individual.⁶¹ Kriterianya adalah akal pikiran kolektif. Sumber formil hukum Islam NU juga bisa berasal dari negara, yaitu hukum positif, dengan kriteria-kriteria tertentu. Pertama, jika hukum positif menetapkan sesuatu yang tidak diperoleh petunjuk *nash* Alquran secara eksplisit, bahkan terkadang syariat sengaja mendiamkannya, yang menyiratkan kreasi untuk mengatur *al-maskut ‘anh* (perkara yang tidak diatur oleh *syara’*), maka hukum positif seperti ini bisa diterima dan diikuti. Kedua, jika hukum positif menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum *syar’i*, maka harus ditolak. Ketiga, jika hukum positif menetapkan dan menganjurkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum *syara’*, atau hukum

⁵⁷ Selengkapnya lihat “Keputusan Mukhtar Ke-33 Nahdlatul Ulama Nomor: 006/MNU-33/VIII/2015 Tentang Bahtsul Masail Ad-Diniyyah Al-Maudlu’iyyah Nahdlatul Ulama, I. Metode Istibath Al-Ahkam Dalam NU” dalam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-Hasil Mukhtar Ke-33*.

⁵⁸ Hasil Mukhtar Ke-33 menjelaskan, bahwa *istihsān* ialah kebijakan mujtahid yang menyimpang dari ketentuan *al-qiyās* yang lebih jelas atau dari ketentuan hukum umum. *Istihsān* bukanlah keinginan nafsu dalam proses penetapan hukum. *Istihsān* mempunyai pijakan dalil yang muaranya ialah memelihara kepentingan dan kemaslahatan manusia. Pada kenyataannya, dalam berbagai kasus hukum, penggunaan *istihsān* tidak dapat dihindari.

⁵⁹ Hasil Mukhtar Ke-33 menjelaskan, *maṣlahah mursalah* berarti setiap hal yang baik dan bermanfaat. *Al-Maṣlahah* dan manfaat adalah dua kata yang se-*wazan* dan semakna. Dalam *uṣūl al-fiqh*, *maṣlahah* berarti setiap hal yang menjamin terwujud dan terpeliharanya tujuan *shāri’* (*maqāṣid al-sharī’ah*), yaitu *hifẓ al-dīn*, *hifẓ al-nafs*, *hifẓ al-‘aql*, *hifẓ al-nasl*/ *hifẓ al-‘irdl*, dan *hifẓ al-māl*.

⁶⁰ Hasil Mukhtar Ke-33 menjelaskan, ‘urf adalah sesuatu yang sudah dikenal bersama dan dijalani masyarakat, baik berupa perbuatan (*‘amalī*) maupun perkataan (*qawli*). ‘Urf dan ‘*ādah* adalah dua kata yang *mafhūm*-nya berbeda tetapi *māshadaq*-nya sama. Artinya, sesuatu disebut ‘urf sekaligus bisa disebut ‘*ādah*, sebaliknya sesuatu bisa disebut ‘*ādah* sekaligus bisa disebut ‘urf. Keduanya sinonim yang dalam bahasa Indonesia disebut tradisi. ‘urf dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjabarkan (*tafsīr*) ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat *ijmālī* dan tidak memiliki standar praktis. Dengan menjadikan ‘urf sebagai salah satu acuan hukum, hukum Islam menjadi sangat dinamis. Hukum dapat berubah karena berubahnya ‘urf.

⁶¹ “Akhirnya, penting dinyatakan sekali lagi bahwa metode istinbath ini harus dilakukan oleh orang yang ahli yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan istinbath. *Istinbath* pun harus dilakukan secara *jama’i* (kolektif) bukan secara *fardi* (individual). Ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan *istinbath al-ahkam*.” Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-Hasil Mukhtar Ke-33*, 171.

positif menetapkan sesuatu yang ditetapkan hukum *syara'* baik dalam perkara wajib atau *mandub* (“anjaran”), maka wajib ditaati, sedangkan jika hukum positif menetapkan sesuatu yang *mubah* (“diperbolehkan”), bermanfaat bagi kepentingan umum, maka juga wajib ditaati, tetapi jika tidak bermanfaat untuk umum, maka tidak wajib ditaati.⁶² Salah satu contoh fatwa NU akan dirujuk untuk membuktikan konsistensi NU menerima hukum positif sebagai sumber hukum Islam, yang kemungkinannya ditolak oleh sebagian umat Islam dan/atau ulama lain.

... “Bagaimana pandangan Islam terhadap persyaratan pendirian masjid terkait dengan Peraturan Bersama Menag dan Mendagri No. 9 dan 8, tahun 2006, di mana persyaratan minimal untuk mendirikan tempat ibadah harus ada 90 orang jama’ah?... Peraturan tersebut dapat dibenarkan dan wajib ditaati apabila mengandung kemaslahatan, karena pemerintah memiliki kewenangan mengatur pembangunan masjid sebagaimana juga pemerintah memiliki kewenangan yang sama dalam mengatur pembangunan tempat ibadah agama lain.”⁶³

Jadi, hukum positif merupakan salah satu sumber formil hukum Islam bagi NU, yang merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Fatwa NU bukan saja membenarkan Peraturan Bersama Menag dan Mendagri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, melainkan pula memfatwakan bahwa menaati peraturan tersebut adalah kewajiban. Adapun kriteria sumber materil hukum Islam menurut NU dapat diamati dalam fatwa-fatwa NU di bidang bisnis (jual beli), bidang ibadah, dan bidang pernikahan.

1. Bidang Bisnis (jual beli). Menurut NU, jual beli mercon yang digunakan untuk memeriahkan hari raya, pesta perkawinan dan lain sebagainya, adalah sah. Diktum fatwa menegaskan: “Jual beli tersebut hukumnya sah! Karena ada maksud baik, ialah: adanya perasaan gembira menggembirakan hati dengan suara petasan itu.”⁶⁴ NU tidak mengemukakan dalil Alquran dan hadis untuk melandasi fatwanya. Alih-alih sumber pokok ajaran Islam, Fatwa NU mencantumkan penjelasan kitab-kitab, yaitu *Fath al-Mu’in* karya Zainuddin al-Malibāri, *I’ānah al-T}ālibīn* karya Muḥammad Shat}a al-Dimyāt}ī, *Hāshiyah*

⁶² Lebih lanjut lihat fatwa tentang “Qanun Wadh’i (Hukum Positif) dan Hukum Syar’i.” Lajnah Ta’lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, *Aḥkām al-Fuqahā’*. 910-911.

⁶³ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-hasil Mukhtamar* 32, 216-217.

⁶⁴ Lihat “Fatwa No 32 Jual Beli Mercon untuk Berhariraya”. Lajnah Ta’lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, *Aḥkām al-Fuqahā’*, 33-34.

al-Jamma<l ‘alā Fath al-Wahhāb karya Sulaimān al-Jammāl, dan Ḥāshiyyah ‘Alī al-Shibramalisi dalam Nihāyah al-Muḥtāj karya ‘Alī al-Shibramalisi. Akan tetapi, tak satupun dari kitab-kitab tersebut yang menyebut langsung mercon. Alih-alih mercon atau petasan, kitab Ḥāshiyyah al-Jamma<l dan Ḥāshiyyah ‘Alī al-Shibramalisi justru berbicara tentang *al-dukhān* yang diterjemahkan oleh fatwa NU dengan kata “rokok”. Sumber hukum fatwa bukanlah sumber formil, melainkan materil. Kriteria sumber materil yang digunakan ialah perasaan dan/atau keyakinan hukum yang bersifat kausalitas, yaitu maksud baik dari jual beli mercon atau petasan, dan mengadakan perasaan gembira dan menggembarakan.

2. Bidang Ibadah. Apa hukumnya memukul kentongan dan bedug untuk memberitahukan waktu-waktu shalat wajib (*farḍu*), baik dipukul sebelum azan maupun setelah azan?

“Adapun hukumnya kentongan, telah menjadi berselisih di antara pendapat para ulama yang besar-besar, kalau ingin mengetahui dalilnya masing-masing harapkanlah membaca kitab-kitabnya yang telah dicetak, kemudian supaya diingat kemaslahatannya dan mafsadahannya, serta diperhatikan benar-benar.”⁶⁵

Fatwa NU tentang memukul kentongan ini tidak mencantumkan sumber pokok ajaran Islam, baik Alquran maupun hadis, untuk dijadikan dalil. Hal demikian mungkin sudah dimaklumi, karena NU mendahulukan *aqwāl al-‘ulamā’* (“opini hukum ulama/Imam Mazhab”) dalam fatwa. Namun, fatwa ini tidak pula menyertakan *aqwāl al-‘ulamā’* dan/atau *ibārah* (“narasi hukum”) dari salah satu kitab, sebagaimana diatur ketentuannya dalam Fatwa tentang Format Penetapan Bahtsul Masail. Seseorang yang berkeinginan mengetahui dalilnya, maka dia diharapkan membaca kitab-kitabnya.

Kendari tidak mencantumkan sumber formil hukum Islam, namun ada dua konsep penting, yaitu kemaslahatan dan kemafsadahan, yang dimintakan perhatiannya oleh NU dalam fatwanya. Dua konsep tersebut, yang dapat

⁶⁵ Lihat “Fatwa No 188 Kentongan dan Bedug yang Dipukul untuk Memberitahukan Waktu Shalat.” Lajnah Ta’līf Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, *Aḥkām al-Fuqahā’*, 183-184.

dipastikan berkaitan langsung dengan hubungan sosial, merupakan sumber materil fatwa tentang hukum memukul kentongan. Pertanyaannya ialah konsep yang mana yang dipilih: kemaslahatan atau kemafsadahan? Pilihan bergantung pada kriteria sumber materilnya, yang tak lain adalah si pemukul kentongan itu sendiri. Fatwa menyajikan alternatif dan mengisyaratkan kriteria sumber materil hukum Islam pada si perasaan atau keyakinan pelaku tentang kemaslahatan dan kemafsadahan memukul kentongan untuk memberitahukan waktu-waktu shalat wajib.

Fatwa tentang memukul bedug, sebagaimana halnya kentongan, tidak mencantumkan sumber pokok ajaran Islam, baik Alquran, hadis, maupun *aqwāl al-‘ulamā’* sebagai dalil.

“Adapun hukumnya “bedug”, maka tidak ada larangan tentang memukul bedug itu, apalagi kalau dengan bedug itu dapat menimbulkan syiar agama Islam. Tapi kalau mengganggu orang yang sembahyang atau orang yang tidur, maka haramlah bedug itu karena mengganggunya.”⁶⁶

Alih-alih sumber formil, diktum fatwa tentang bedug menyajikan sumber materil, yaitu hubungan sosial. Jika memukul bedug dapat menimbulkan syiar agama Islam, maka kriterianya bergantung pada perasaan atau keyakinan si pemukul itu sendiri. Demikian pula halnya dengan terganggu atau tidaknya orang lain yang diakibatkan oleh bunyi bedug, baik ketika shalat maupun tidur. Fatwa menyajikan sumber materil hukum Islam tentang memukul bedug untuk memberitahukan waktu-waktu shalat wajib, sedangkan kriterianya terletak pada perasaan atau keyakinan hukum si pelaku.

3. Bidang pernikahan. NU, pada Muktamar XXX Tahun 1999, menetapkan beberapa fatwa. Salah satunya Fatwa tentang Wali Hakim Dalam Pernikahan, yang merupakan jawaban atas dua pertanyaan. Pertama, apakah wali hakim pernikahan berada di tangan presiden atau menteri agama? Kedua, bila di tangan presiden apakah wanita sah menjadi wali hakim? Untuk pertanyaan pertama, NU menjawab: “Wilayah hakim dalam pernikahan berada di tangan presiden dan

⁶⁶ Lihat “Fatwa No 188 Kentongan dan Bedug yang Dipukul untuk Memberitahukan Waktu Shalat.” Lajnah Ta’līf Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, *Aḥkām al-Fuqahā’*, 183-184.

aparatus yang ditunjuk presiden.” Untuk pertanyaan kedua, NU menjawab: “Sah karena kelembagaan presiden sebagai *wilāyah al’āmmah*.”⁶⁷ Diktum fatwa NU tidak terlepas dari deskripsi masalah yang dikemukakannya sebelum diktum fatwa, bahwa pasca Pemilu 1999 PBNU harus memiliki sikap tegas dan jelas mengenai masalah yang sangat prinsip bagi kaum Muslim, yaitu masalah wali hakim pernikahan apabila Presiden RI dijabat oleh wanita. Megawati Soekarno Putri, seperti diketahui, memiliki peluang besar untuk menjadi Presiden RI pasca runtuhnya Orde Baru 1998. Deskripsi masalah fatwa NU, jikalau dipahami menurut pendapat Algra dan van Duyvendijk, menggambarkan hubungan kekuatan politik yang berpotensi menjadi sumber hukum materil.

Kendati tanpa mencantumkan Alquran dan Hadis, Fatwa NU menggunakan sumber formil fatwa lainnya. Fatwa merujuk dua kitab, yaitu (1) *al-Tajrīd li Naf’i al-‘Ābid* karya Sulaimān al-Bujairami, yang di dalamnya terdapat keterangan bahwa seorang wanita boleh mengakadnikahkan wanita lain jika dia memegang *al-imāmah al-‘uzhmā* atau, menurut terjemahan fatwa NU, jabatan tertinggi negara, dan (2) *Hāshiyyah al-Bajuri ‘ala Fath al-Qarīb* karya Ibrāhīm al-Bajuri, yang di dalamnya terdapat keterangan yang mensahkan seorang wanita menikahkan wanita lain apabila dia menjabat *al-imāmah al-‘uzhmā* atau, menurut terjemahan fatwa NU, pimpinan tertinggi negara. Dengan demikian, presiden wanita memiliki otoritas menjadi wali hakim pernikahan yang diadakan di wilayah kekuasaan umumnya (*wilāyah al’āmmah*-nya). Kesimpulan yang dihasilkan dari telaah sumber formil didukung oleh kriteria sumber materil fatwa, yaitu otoritas politik, pemerintahan dan kenegaraan, di Indonesia yang dimiliki presiden, meskipun berjenis kelamin wanita.

Sumber materil fatwa NU yang lain, yang masih berkaitan dengan pernikahan, bahkan menggunakan otoritas ilmiah. Hasil-hasil penelitian ilmiah memang merupakan salah satu sumber materil hukum konvensional. Apa hukum membatasi keturunan atau merencanakan keluarga (*familiy planning*), misalnya menggunakan kondom? NU memfatwakan hukumnya makruh, namun:

⁶⁷ Lihat “Fatwa 422 Wali Hakim dalam Pernikahan”. Lajnah Ta’lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, *Aḥkām al-Fuqahā’*, 562, 564.

“... kalau dengan sesuatu yang memutuskan kehamilan sama sekali, maka hukumnya haram, kecuali kalau ada bahaya. Umpamanya saja karena terlalu banyak melahirkan anak yang menurut pendapat orang yang ahli tentang hal ini bisa menjadikan bahaya, maka hukumnya boleh dengan jalan apa saja.”⁶⁸ Pendapat ahli menjadi penentu hukum memutuskan kehamilan secara total, dari yang semula haram menjadi boleh. Definisi bahaya ditentukan oleh hasil diagnosa atau hasil penelitian ahli. Kriteria sumber materi fatwa NU ini ialah pendapat ahli, bukan ulama.

G. Kriteria Sumber Formil dan Materi Hukum Islam MUI

MUI merupakan organisasi para ulama dari beragam kalangan, tanpa kecuali ulama Muhammadiyah dan NU. Komponen kepengurusan MUI lebih majemuk ketimbang organisasi Islam lainnya. Sejak 1975, MUI mengeluarkan fatwa. Lembaga yang khusus mengeluarkan fatwa bernama Komisi Fatwa. Ketika ekonomi syariah berkembang signifikan di Indonesia, MUI membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) untuk memenuhi kebutuhan fatwa yang khusus terkait ekonomi syariah.

Pedoman Penetapan Fatwa MUI yang paling mutakhir menerangkan, bahwa sumber fatwa MUI ialah Alquran, Hadis, Ijmak, Qiyas, dan dalil lain yang *mu'tabar*.⁶⁹ Fatwa-fatwa Komisi Fatwa dan DSN-MUI mesti bertolak dari sumber yang sudah difatwakan secara resmi dan formil tersebut. Jika hukum suatu permasalahan sudah termaktub di dalam sumber formil fatwa, maka otomatis hukum permasalahannya sudah jelas dan sudah memiliki dalil. “Penetapan fatwa yang telah jelas hukum dan dalil-dalilnya (*ma'lūm min al-dīn bi al-ḍarūrah*) dilakukan dengan menyampaikan hukum sebagaimana apa adanya.”⁷⁰ Jika sudah *ma'lūm min al-dīn bi al-ḍarūrah*, maka Komisi Fatwa menetapkan fatwa melalui surat dan/atau melalui lisan secara langsung sesuai dengan hukum dan dalil-

⁶⁸ Lihat “Fatwa 283 *Family Planning* (Perencanaan Keluarga)”. Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, *Aḥkām al-Fuqahā'*, 302.

⁶⁹ Pasal 3 Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Hasanudin AF, dkk., *Pedoman Penetapan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: MUI, 2016), 9.

⁷⁰ Lihat Pasal 6 ayat 1 Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Hasanudin AF, dkk., *Pedoman Penetapan Fatwa*. 10

dalilnya yang sudah jelas, tanpa melalui Rapat Komisi Fatwa.⁷¹ Akan tetapi, MUI menyadari tidak semua masalah merupakan masalah yang dalilnya sudah termaktub di dalam Alquran dan Hadis.

Pasal 6 Pedoman Penetapan Fatwa MUI memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur apabila Komisi Fatwa belum menemukan dalil atas suatu masalah termaktub di dalam Alquran dan Hadis. Ketentuan-ketentuan yang diatur Pasal 6 bersifat formil, sehingga sumber formil lain fatwa MUI adalah, sebagaimana Muhammadiyah dan NU, ijtihad, atau akal pikiran, yang dibimbing oleh metode tertentu. MUI menerapkan tiga metode sebelum mengeluarkan fatwa tentang suatu masalah yang belum atau tidak jelas hukum dan dalil-dalilnya. Pertama, menerapkan metode *al-jam'u wa al-taufiq*, yaitu pencapaian titik temu di antara pendapat-pendapat yang saling berbeda (*masā'il khilāfīyah*) di kalangan mazhab. Metode pertama berkenaan dengan masalah yang hukumnya diperselisihkan para ulama madzhab hukum Islam. Status pendapat mereka kurang lebih sama dengan status pendapat sarjana hukum, yang menurut hukum konvensional, sebagai sumber hukum formil. Kedua, menerapkan metode *bayānī, ta'līlī* (antara lain *qiyāsī, istihsānī* dan *sad al-dzarā'i*), dan *minhājī* (memedomani metode penetapan hukum madzhab). Metode kedua berkenaan dengan masalah hukum yang, selain tidak termaktub di dalam Alquran dan Hadis, tidak terdapat di dalam pendapat madzhab-madzhab hukum Islam atau para ulama *mu'tabar*. Ketiga, menerapkan metode yang boleh disebut “deskriptif,” yaitu menyampaikan perbedaan pendapat disertai argumentasi masing-masing, penjelasan pengamalannya, mengambil yang paling hati-hati (*iḥtiyātī*), dan sedapat mungkin keluar dari perbedaan pendapat (*al-khurūj min al-khilāf*). Metode ketiga khusus berkenaan dengan masalah yang diperselisihkan para Anggota Rapat Komisi Fatwa dan belum mencapai titik temu.⁷² Jika ijtihad merupakan salah satu sumber formil fatwa, sebagaimana halnya

⁷¹ Kedudukan Rapat Komisi Fatwa, yang bisa “diabaikan” karena suatu masalah tergolong *ma'lūm min al-dīn bi al-djārūrah*, diatur dalam Pasal 7 Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. “Fatwa MUI adalah Fatwa MUI tentang suatu masalah keagamaan yang telah disetujui oleh anggota Komisi dalam rapat komisi.” Hasanudin AF, dkk., *Pedoman Penetapan Fatwa*, 7.

⁷² Lihat Pasal 6 ayat 1 Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Hasanudin AF, dkk., *Pedoman Penetapan Fatwa*. 10.

pendapat sarjana hukum, menurut hukum konvensional, merupakan sumber hukum formil, maka apakah semua ijtihad dapat dijadikan sumber? Kriterianya adalah kolektivitas sebagaimana ditegaskan dalam pedoman penetapan fatwa mutakhir. “Penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang disebut Komisi Fatwa.”⁷³ Mengingat penetapan fatwa ekonomi syariah, yang khusus dilakukan oleh DSN-MUI, mengikuti pedoman yang sama,⁷⁴ maka kriteria sumber formil fatwanya identik dengan sumber formil fatwa Komisi Fatwa.

Menurut MUI, “proses penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif dan antisipatif.” Berdasarkan tiga karakteristik tersebut, MUI melalui fatwa-fatwanya tampaknya bertujuan untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum kontekstual, “progesif”, bahkan futuristik. Fatwa merupakan medium penyelesaian problem aktual, dan perubahan sosial, yang didasarkan pada sumber-sumber tekstual ajaran Islam.

Ada kunci-kunci penyelesaian masalah hukum yang diformalisasikan oleh MUI, seperti tarjih dan *sad al-dzariah*, yang disesuaikan dengan kategori masalah yang dihadapi (Kategori B atau C misalnya).

Alquran tak lagi membutuhkan kriteria. Sunnah tetap membutuhkan kriteria, seperti kesahihan, keterandalan, dan lain sebagainya. Adapun masalah-masalah *ijtihadiyah* terkadang membutuhkan intervensi dari berbagai pihak yang secara formil tak selalu memiliki keahlian di bidang fatwa, yang berfungsi memberikan *input* nontekstual. “Dalam bidang yang memerlukan keahlian fikih secara khusus, seperti proses penyembelihan dan proses pensucian, Auditor Halal dalam menjalankan tugasnya disertai Komisi Fatwa.” “Penetapan fatwa produk halal dilakukan setelah adanya laporan hasil pemeriksaan (*auditing*) oleh Auditor Halal

⁷³ Pasal 2 Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Hasanudin AF, dkk., *Pedoman Penetapan Fatwa*. 9.

⁷⁴ Lihat Pasal 22 ayat 2 Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Hasanudin AF, dkk., *Pedoman Penetapan Fatwa*. 16. Fatwa ekonomi syariah adalah fatwa yang terkait dengan produk dan jasa keuangan syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Fatwa lain dikeluarkan oleh MUI ialah fatwa produk halal, yaitu fatwa yang ditetapkan oleh Komisi Fatwa mengenai produk pangan, obat-obatan dan kosmetika.

dan telah melalui proses evaluasi dalam Rapat Auditor LPPOM MUI.”⁷⁵ Bahan atau materi masukan yang diperlukan sebelum penetapan fatwa tak selamanya berupa dalil tekstual, melainkan pula hasil pemeriksaan ahli atau profesional terhadap suatu perkara. Kriteria sumber formil fatwa untuk masalah-masalah *ijtihadiyah* ialah ketepatan dan profesionalisme.

Dari kriteria formil tersebut dapat dimengerti, bahwa fatwa-fatwa MUI bukan saja bersifat argumentatif, artinya memiliki kekuatan hujjah, dan legitimatif, artinya menjamin penilaian keabsahan hukum, melainkan pula kontekstual (*waqi'iy*), aplikatif (siap diterapkan), dan moderat.⁷⁶ Kontekstual dan aplikatif mengindikasikan bahwa fatwa MUI, demikian pula fatwa-fatwa DSN-MUI yang mengikuti pedoman yang sama, akan mempertimbangkan faktor-faktor realistik hukum. Hukum memang mensyaratkan realitas yang menjadi lokasi gerakannya. Empirisme hukum mengandaikan hukum yang berjalan sesuai keadaan objektif dan fungsional. Ini bersesuaian dengan sifat moderat fatwa MUI. Fatwa dapat diisi oleh asupan materil dari berbagai sumber yang dibenarkan. “Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh syari’at serta mempertimbangkan keamaslahatan umum dan *maqashid al-syariah*.”⁷⁷ Kemaslahatan umum adalah kriteria sumber materil hukum yang dipegang MUI dalam menetapkan fatwa-fatwanya.

Kemaslahatan umum, yang merupakan kriteria sumber materil itu, disebut terlebih dahulu ketimbang tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī’ah*) yang juga diakui, secara materil, sebagai kriteria fatwa. Preferensi menandakan skala prioritas. Fatwa-fatwa MUI yang mempertimbangkan kemaslahatan umum akan menguatkan sifat legitimatif dan aplikatif fatwa. Salah satu cara pencapaiannya ialah “... dengan bahasa hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat luas.”⁷⁸ Fatwa diharapkan

⁷⁵ Lihat Pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Hasanudin AF, dkk., *Pedoman Penetapan Fatwa*. 15.

⁷⁶ Lihat Pasal 4 ayat 2 Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Hasanudin AF, dkk., *Pedoman Penetapan Fatwa*. 9.

⁷⁷ Lihat Pasal 7 Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Hasanudin AF, dkk., *Pedoman Penetapan Fatwa*. 11.

⁷⁸ Lihat Pasal 12 Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Hasanudin AF, dkk., *Pedoman Penetapan Fatwa*. 12.

mudah dipedomani oleh masyarakat. Fatwa, jika dilihat dari sudut tertentu, memang berasal dari (persoalan) masyarakat dan kembali ke (kemaslahatan) mereka. Tujuan ini merupakan kriteria atau patokan sumber hukum materil MUI. Jadi kriteria sumber hukum materil MUI mencakupi tuntunan tekstual hingga kontekstual. Penerapan kriteria ini dapat ditemukan dalam Beberapa contoh fatwa MUI dan/atau fatwa DSN-MUI, seperti persoalan ibadah, pernikahan dan ekonomi, sebagai berikut:

1. Bidang Ekonomi dari DSN-MUI

Contoh sumber materil fatwa DSN-MUI yang kriterianya berasal dari ilmu akuntansi ialah Fatwa tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah. Fatwa ini menerangkan, lebih tepatnya lagi mempertimbangkan, bahwa “dalam sistem pencatatan dan pelaporan (akuntansi) keuangan dikenal ada dua sistem. Sistem pertama ialah *cash basis*, yang berarti “prinsip akuntansi yang mengharuskan pengakuan biaya dan pendapatan pada saat terjadinya.” Sistem kedua ialah *accrual basis*, yang berarti “prinsip akuntansi yang membolehkan pengakuan biaya dan pendapatan didistribusikan pada beberapa periode.” Menurut DSN-MUI, kedua sistem tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan.⁷⁹

Sistem *cash basis* dan *accrual basis* tidak berasal dari teks sumber hukum Islam atau doktrin hukum Islam klasik. Kedua sistem tersebut berasal dari para ahli akuntansi. Keduanya jelas pula bersumber dari luar, dan praktis sulit dihindari oleh lembaga yang menerapkan prinsip akuntansi. Kendati demikian, DSN-MUI berpendapat, sistem *cash basis* dan *accrual basis* pada dasarnya dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). DSN-MUI selanjutnya menyebutkan presisi kemaslahatan kedua sistem. Menurut diktum fatwanya, DSN menyatakan bahwa dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), untuk pencatatan sebaiknya digunakan sistem *accrual basis*, sedangkan distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas

⁷⁹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional N0: 14/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah.

dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (*cash basis*).⁸⁰ Dari delapan sumber hukum materil, yaitu (1) hubungan sosial; (2) hubungan kekuatan politik; (3) situasi sosial-ekonomis; (4) tradisi; (5) hasil penelitian ilmiah; (6) opini umum; (7) dinamika dunia internasional, dan (8) keadaan geografis, fatwa ini kriterianya apa?

2. Bidang ibadah. Dalam salah satu fatwanya, MUI mengeluarkan fatwa yang menyangkut ibadah, yaitu ibadah haji, tanpa menggunakan satu pun dalil Alquran dan hadis. Demikianlah Fatwa MUI tentang Miqat Makani yang ditetapkan pada tahun 1996. Dalam fatwanya, MUI berpendapat bahwa karena jemaah haji Indonesia yang akan langsung ke Mekah tidak melalui salah satu dari Miqat Makani yang telah ditentukan Rasulullah, maka MUI berpendapat bahwa miqat makani bagi mereka, kendati merupakan masalah ibadah, adalah termasuk masalah ijtihadiyah, sehingga miqat makani bagi jemaah haji Indonesia itu ialah (1) Bandara Jeddah (King Abdul Aziz) bagi mereka yang langsung ke Mekkah, dan (2) Bir Ali bagi mereka yang lebih dahulu ke Madinah. Menurut fatwa MUI, miqat makani tersebut bukanlah menambah miqat baru selain yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Alih-alih Alquran dan hadis, MUI mendalilkan dua hal. *Pertama*, jarak antara Bandara King Abdul Aziz Jeddah dengan Mekkah telah melampaui 2 (dua) marhalah. Kebolehan berihram dengan jarak seperti itu termasuk telah disepakai ulama. *Kedua*, penggunaan *mawaqit manṣūṣah* dengan teori *al-muḥazāh* menunjukkan bahwa pelaksanaan penggunaan miqat adalah masalah ijtihadi.⁸¹ Fatwa MUI ini menjelaskan argumentasi rasional, praktis dan pragmatis, yang sangat kentara ketimbang dalil tekstual, kendati berkenaan dengan masalah ibadah. Dari delapan sumber hukum materil, yaitu (1) hubungan sosial; (2) hubungan kekuatan politik; (3) situasi sosial-ekonomis; (4) tradisi; (5) hasil penelitian ilmiah; (6) opini umum; (7) dinamika dunia internasional, dan (8) keadaan geografis, fatwa ini kriterianya apa?

⁸⁰ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional N0: 14/DSN-MUI/IX/2000.

⁸¹ Lihat Fatwa MUI tentang Miqat Makani yang dikeluarkan pada Tanggal 4 Mei 1996. Ma'ruf Amin, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 174-175.

3. Bidang Pernikahan. Pada tahun 2006 MUI mengeluarkan fatwa tentang nikah di bawah tangan. Fatwa MUI menjelaskan bahwa nikah di bawah tangan masih sering dijumpai di tengah masyarakat. Dalam pengertian umum dan pengertian yang juga diterima oleh MUI, nikah di bawah tangan merupakan praktik pernikahan yang tidak dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setidaknya, ada dua peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan pernikahan umat Islam sebelum fatwa MUI ini dikeluarkan, yaitu UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan sebagaimana sekarang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikeluarkan berdasarkan Instruksi Presiden RI Tahun 1991. MUI memiliki definisi khusus tentang nikah di bawah tangan. Fatwa MUI menjelaskan bahwa nikah di bawah tangan ialah:

“Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.”⁸²

Pertanyaannya ialah bagaimana status hukum nikah di bawah tangan? Fatwa MUI mengemukakan ketentuan hukum nikah di bawah tangan. Pertama, “pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *madharrah*.”. Kedua, “pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/*madharrah* (*saddan li al-dzari’ah*).”⁸³ Adalah menarik disimak bahwa diktum Fatwa MUI yang mengesahkan nikah di bawah tangan karena sudah memenuhi syarat dan rukunnya berbeda dengan ketentuan Pasal 4 KHI yang menyatakan, bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”⁸⁴ Demikian pula haramnya pernikahan

⁸² Lihat “Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan.” Ma’ruf Amin, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 531, 534.

⁸³ Lihat “Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan.” Ma’ruf Amin, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 534.

⁸⁴ Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikeluarkan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991.

di bawah tangan bukan karena tidak dicatat sebagaimana diatur oleh Pasal 5 ayat (1) KHI (“Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”), dan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1/1974 jo UU Nomor 16/2019 (“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”), melainkan karena *madharrah*, dampak negatif, dan preventif (*sad al-dzari’ah*). Fatwa MUI memang mencantumkan dalil-dalil tekstual, yaitu Alquran dan hadis, namun tidak ada yang menyebutkan pencatatan nikah secara langsung. Alasan pengharaman nikah di bawah tangan justru lebih mendekati 2 (dua) kaidah fikih yang dikutip dalam fatwa MUI, yaitu (1) tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan, dan (2) mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan.

H. PENUTUP

Kriteria sumber formil dan materil hukum Islam dalam fatwa-fatwa Muhammadiyah adalah: (1) tekstualitas, ini khusus Alquran, dan (2) ke-*makbulah*-an (yang dapat diterima) untuk Sunah. Muhammadiyah menerima akal sebagai sumber hukum formil Islam dengan tiga kriteria inti, yaitu: (1) keselarasannya dengan rujukan tekstual, (2) kolektivitas (ijtihad kolektif) dengan keterlibatan pakar/profesional dan/atau ulama interna dan/atau eksternal Muhammadiyah, dan (3) hukum positif (*‘urf qanuni*). Kriteria sumber hukum materil bersifat “independen” dari teks, seperti dalam kasus shalat iftitah dalam shalat Lail/Tarawih. Majelis Tarjih mempertimbangkan alasan kontekstual ketimbang tekstual, yang mendasari opsi shalat iftitah dua rakaat berjamaah atau sendiri-sendiri. Kriterianya ialah kriteria materil, yaitu keyakinan jamaah itu sendiri.

Kriteria sumber formil dan materil hukum Islam dalam fatwa-fatwa NU adalah tekstualitas Alquran dan hadits sebagaimana dipahami oleh para ulama, khususnya dari Mazhab Syafi’i. NU dapat menerima akal pikiran sebagai sumber hukum Islam dengan kriteria keselarasannya dengan tujuan syari’at (*maqashid syari’ah*). NU, seperti halnya Muhammadiyah, dapat menerima hukum positif sebagai kriteria hukum Islam baik secara formil maupun materil seperti

diperlihatkan oleh fatwa-fatwanya di bidang bisnis, ibadah, dan pernikahan. Adalah khas NU yang menerima kitab-kitab klasik sebagai kriteria historis akal.

Kriteria sumber formil dan materil hukum Islam dalam fatwa-fatwa MUI adalah tekstualitas Alquran dan hadits. MUI menerima akal pikiran sebagai sumber formil dan materil hukum Islam dengan kriteria keselarasannya dengan *mashlahah* yang bersifat publik, keumatan dan kebangsaan, *sadd al-dzari'ah* (“tindakan preventif”), atau berdiri sendiri seperti halnya fatwa tentang miqat makani. MUI dapat, seperti halnya Muhammadiyah dan NU, menerima hukum positif sebagai kriteria sumber hukum Islam seperti diperlihatkan oleh fatwa-fatwanya di bidang ekonomi, ibadah, dan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri, "Expanding A Formal Role for Islamic Law in the Indonesian Legal System: The Case of Mu'amalat", *Journal of Law and Religion* 23 (1), 2007/2008, 249-270.
- Algra, N.E. dan K. Van Duyvendijk, *Mula Hukum* (tanpa kota, BinaCipta, 1983), penerjemah J.C.T. Simorangkir.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judiciaprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal* (Jakarta: Kencana 2012)
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998)
- al-Zarqā', Muṣṭafā Aḥmad. *Al-Fiqh al-Islāmī fī Thaūbihi al-Jadīd*, (Damaskus: Alif Ba' al-Adīb, 1968), jilid 2
- Anwar, Syamsul. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX, 2018)
- Apeldoorn, L.J. van. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: P.T. Pradnya Paramita, 1983)
- Arto, Mukti. *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan Buku Kedua* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018)
- Coulson, Noel J. *Conflict and Tensions in Islamic Jurisprudence* (Chicago & London, The University of Chicago Press, Chicago, The University of Chicago Press, Ltd., London W.C.I, 1969)
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional N0: 14/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah.
- Hasan, Hasbi. *Pemikiran dan Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer* (Depok: Gramata Publishing, 2011)
- Hooker, M.B. *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2008)
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991: "Menyebarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)"
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Teori Hukum Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan* (Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2019)

- Lajnah Ta'lif Wan (LTN) NU Jawa Timur bekerjasama dengan “Khalista” Surabaya, *Aḥkām al-Fuqahā' fī Muqarrāt Mu'tamar Nahdlatul Ulama*: *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M.)*, penyelaras LTN PBNU, Penerbit “Khalista” Surabaya bekerjasama dengan LTN PBNU, 2011)
- Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur bekerjasama dengan “Khalista” Surabaya, *Aḥkām al-Fuqahā' fī Muqarrāt Mu'tamar Nahdlatul Ulama*: *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M.)*, penerj. H.M. Djamaluddin Miri (Surabaya: (LTN) NU Jawa Timur bekerjasama dengan “Khalista” Surabaya, 2007)
- Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penetapan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: MUI, 2016)
- Moh. Lutfi Nurcahyono, “Pembaruan Metode Penemuan Hukum Islam: Pendekatan Terpadu Hukum Islam dan Sosial,” *Ulumuna Jurnal Studi Keislaman* 16 (1), 2012, 21-40
- Mudzhar, Mohamad Atho. *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach*. (Jakarta: Office of Religious Research and Development and Training, Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, 2003)
- Nashir, Haedar. *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia* (Bandung: Penerbit Mizan bekerjasama dengan Maarif Institute for Culture and Humanity, 2013)
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016)
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2016)
- Praja, Juhaya S. *Teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011)
- Rahardjo, Satjipto, Ronny Habintijo Soemitro, dan A Siti Sotemi, *Materi Pokok Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Karunika Jakarta Universitas Terbuka, 1986)
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006)
- Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011)

- Summers, Robert S. "Formal Legal Truth and Substantive Truth in Judicial Fact-Finding: Their Justified Divergence in Some Particular Cases," *Law and Philosophy* 18, no. 5 (1999): 497.
- Susanto, Anthon F. *Hukum Dari Consilience ke Paradigma Hukum Konstruktif-Transgresif* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017)
- Tim Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 3* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017)
- Tim Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 2* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015)
- Tim Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 1* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015)
- Tim Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 8* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017), 52.